



# Fenomena *Brain Drain* di Kalangan Generasi Muda: Tantangan Cinta Tanah Air di Era Globalisasi

Portia Puteri Aditama<sup>1\*</sup>, Hanif Nahrufirdaus<sup>1</sup>, Muhammad Maftuh Maulana<sup>1</sup>, Damar Patria Mahardika<sup>2</sup>  
Hangestuti Wardani<sup>2</sup>, Farhan Hamid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup>Departemen Teknik Geologi, Universitas Gadjah Mada

<sup>1\*</sup>[portiaputeriaditama2006@mail.ugm.ac.id](mailto:portiaputeriaditama2006@mail.ugm.ac.id), <sup>2</sup>[hanifnahrufirdaus2004@mail.ugm.ac.id](mailto:hanifnahrufirdaus2004@mail.ugm.ac.id), <sup>3</sup>[muhammadmaftuhmaulana@mail.ugm.ac.id](mailto:muhammadmaftuhmaulana@mail.ugm.ac.id),  
<sup>4</sup>[damarpatriamahardika@mail.ugm.ac.id](mailto:damarpatriamahardika@mail.ugm.ac.id), <sup>5</sup>[hangestutiwardani@mail.ugm.ac.id](mailto:hangestutiwardani@mail.ugm.ac.id), <sup>6</sup>[farhanhamid@mail.ugm.ac.id](mailto:farhanhamid@mail.ugm.ac.id)

## Abstrak

Fenomena *brain drain* di era globalisasi menjadi isu penting bagi kalangan generasi muda Indonesia, terutama tertuju pada mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi yang memilih merintis karier dan menetap di luar negeri. Upaya dari pemerintah berupa program beasiswa seperti LPDP merupakan bentuk investasi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kontribusi bagi pembangunan nasional. Namun, baru-baru ini munculnya tren seperti *#KaburAjaDulu* menunjukkan adanya krisis kepercayaan sebagian kalangan generasi muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan prospek karier di dalam negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana fenomena *brain drain* sebagai tantangan terhadap nilai cinta tanah air dan nasionalisme generasi muda. Dengan metode pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan netnografi. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa fenomena *brain drain* dipicu oleh faktor pendorong seperti keterbatasan lapangan kerja, fasilitas riset yang rendah, dan ketidakpastian karier, serta faktor daya tarik dari luar domestik berupa kesejahteraan, profesionalisme, dan peluang berkembang yang luas. Selain memunculkan pergeseran makna nasionalisme di kalangan generasi muda, fenomena ini berdampak pada berkurangnya potensi sumber daya manusia nasional sehingga diperlukan integrasi di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan penguatan nilai nasionalisme agar generasi muda tetap kompetitif secara global sekaligus berkomitmen penuh terhadap bangsa atau tanah air.

**Kata Kunci:** *brain drain*, generasi muda, LPDP, nasionalisme, globalisasi

## PENDAHULUAN

Arus globalisasi telah membuka gerbang berupa peluang lebar bagi generasi muda Indonesia untuk menempuh pendidikan dan meniti karier di kancan internasional. Di era digital, dimana akses informasi dan kemajuan teknologi, serta tingginya mobilitas global menjadikan perpindahan tenaga kerja terdidik sebagai fenomena yang semakin umum terjadi. Dalam fenomena ini, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui berbagai program investasi pendidikan, salah satunya adalah program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dimana program tersebut bertujuan mencetak kader bangsa yang kompetitif dan dapat bersaing secara global sekaligus berkontribusi dalam membangun tanah air (Hayati dkk., 2025; Oriza & Hanita, 2022).

Namun, di balik besarnya ambisi negara terhadap pendidikan, Indonesia dihadapkan pada fenomena *brain drain*, yaitu kecenderungan tenaga terdidik untuk melanjutkan kariernya di luar negeri. Sebagian penerima beasiswa memilih menetap di luar negeri dan tidak kembali ke Indonesia meskipun memiliki kewajiban pengabdian kepada negara. Menurut data per Februari 2026, dari 32.876 alumni LPDP, terdapat 44 penerima beasiswa yang teridentifikasi belum kembali ke Indonesia untuk kewajiban pengabdian. Sebanyak delapan orang di antaranya telah dikenai sanksi, sedangkan 36 lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Fenomena ini semakin menjadi perhatian publik dengan munculnya tren dan viralnya *#KaburAjaDulu* di media sosial menunjukkan cerminan pudarnya rasa generasi muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan prospek karier di Indonesia (Fachrie & Wahyudi, 2025).

Fenomena ini dipicu oleh faktor pendorong (*push factors*) seperti terbatasnya lapangan pekerjaan, fasilitas riset yang rendah, ketidakpastian karier, dan sistem birokrasi yang kurang mendukung. Di sisi lain, negara maju membawa faktor penarik (*pull factors*) yang sangat menjanjikan seperti, lapangan pekerjaan yang baik, terjaminnya kesejahteraan, serta budaya dan lingkungan kerja profesional yang lebih menjanjikan generasi muda Indonesia untuk meniti karier dan menetap di luar negeri (Sarjito, 2025; Sutiani dkk., 2025; Wardin, 2002).

## Investasi SDM dan Komitmen Bela Negara

Investasi sumber daya manusia (SDM) merupakan strategi fundamental dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pemerintah mengimplementasikan program beasiswa LPDP sebagai instrumen investasi pendidikan jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM di berbagai bidang strategis, sekaligus

menjadi wahana pembentukan pemimpin masa depan yang diharapkan berkontribusi bagi kemajuan bangsa (Hayati et al., 2025; Oriza & Hanita, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari LPDP, penerima beasiswa LPDP mengalami peningkatan kompetensi yang signifikan dan berkontribusi di sektor-sektor unggulan. Statistik menunjukkan peningkatan ini dari penyerapan karier mereka yang strategis di dalam negeri. Dari total alumni, mayoritas berkontribusi di sektor publik (67,54%) dan sektor privat (33,46%). Namun, efektivitas investasi ini sangat bergantung pada komitmen alumni untuk kembali dan mengabdikan di tanah air. Komitmen bela negara dalam konteks modern mencakup dedikasi setiap warga negara untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa sesuai keahlian yang dimiliki. Bagi penerima beasiswa LPDP, hal ini diwujudkan melalui kewajiban kembali ke Indonesia dan mengaplikasikan ilmu untuk kepentingan nasional. (Nabil et al., 2025).

Realita menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen yang diharapkan dan kondisi aktual. Kecenderungan sebagian alumni LPDP yang enggan kembali pascastudi, mencerminkan krisis komitmen yang berimplikasi serius terhadap efektivitas investasi SDM negara (Robbani et al., 2023). Persoalan ini diperparah oleh distribusi penerima manfaat yang belum merata antara daerah perkotaan dan pedesaan yang berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antardaerah (Hayati et al., 2025). Strategi retensi talenta membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup penciptaan ekosistem karier yang kondusif, penghargaan kompetitif, serta jaminan aktualisasi diri karena obligasi legal kepulangan semata terbukti tidak cukup efektif (Sarjito, 2025).

Teori permainan menganalisis situasi di mana keputusan satu pihak memengaruhi hasil yang diperoleh pihak lain. Dalam konteks *brain drain*, teori ini menawarkan kerangka analitik untuk memahami interaksi strategis antara pemerintah sebagai pemberi beasiswa, penerima beasiswa sebagai individu rasional, dan pasar tenaga kerja internasional ketika setiap aktor berinteraksi dalam struktur insentif yang menentukan keseimbangan akhir sistem. Penerima beasiswa LPDP menghadapi dilema antara memaksimalkan keuntungan pribadi dengan menetap di luar negeri versus memenuhi kewajiban moral terhadap negara dengan kembali ke Indonesia. Jika mayoritas alumni membuat keputusan serupa untuk menetap, negara kehilangan manfaat dari investasi masif yang telah dilakukan yaitu sebuah kondisi yang secara kolektif lebih merugikan, sebagaimana digambarkan dalam *Prisoner's Dilemma*.

Keseimbangan Nash yang diinginkan adalah kondisi di mana penerima beasiswa secara rasional memilih kembali ke Indonesia karena insentif yang ditawarkan cukup menarik. Pencapaiannya memerlukan intervensi yang mengubah struktur *payoff*, yakni meningkatkan daya tarik kepulangan sekaligus mengurangi kesenjangan dengan opsi menetap di luar negeri melalui reformasi ekosistem ketenagakerjaan dan penciptaan peluang riset berstandar internasional (Sarjito, 2025).

Dalam perspektif *repeated game*, kepercayaan antara pemerintah dan alumni menjadi faktor penentu. Konsistensi pemerintah dalam menepati janji terkait kondisi karier bagi alumni yang kembali dapat membangun norma kooperatif dari waktu ke waktu. Sebaliknya, ketidakkonsistenan kebijakan akan mendorong alumni memilih strategi non-kooperatif sebagai respons rasional.

Secara praktis, pendekatan teori permainan mengimplikasikan tiga hal: (1) perancangan mekanisme komitmen yang kredibel; (2) desain kontrak beasiswa dengan struktur insentif yang lebih canggih disertai kombinasi insentif positif dan monitoring transparan, bukan sekadar sanksi; serta (3) pembangunan jaringan alumni yang kuat sebagai mekanisme koordinasi untuk mendorong keseimbangan kooperatif (Fachrie & Wahyudi, 2025).

### Analisis Pragmatik

Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji penggunaan bahasa berdasarkan konteks sosial dan situasi tutur. Dalam kajian pragmatik, makna suatu tuturan tidak hanya dipahami dari struktur bahasa, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan antara penutur dan lawan tutur, tujuan komunikasi, serta kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Dalam komunikasi digital, penggunaan bahasa sering kali tidak memperhatikan prinsip kesantunan sehingga memunculkan berbagai bentuk ujaran agresif di media sosial.

Perkembangan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X telah mengubah pola komunikasi masyarakat menjadi lebih terbuka dan bebas. Namun, anonimitas dan minimnya kontak langsung dalam komunikasi daring menyebabkan pengguna lebih mudah menyampaikan hinaan, ejekan, maupun sindiran tanpa mempertimbangkan etika berbahasa. Fenomena ini kemudian berkembang menjadi *cyberbullying* dan *cancel culture*, yaitu tindakan penghakiman publik secara massal terhadap individu tertentu di ruang digital. Dalam teori ketidaksantunan Culpeper, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *negative impoliteness* karena bertujuan merendahkan, memperlakukan, atau menyerang lawan tutur melalui bahasa.

Diskusi publik di media sosial terkait kasus Dwi Sasetyaningtyas menunjukkan maraknya ketidaksantunan berbahasa sebagai bentuk ekspresi opini. Bentuk-bentuk yang muncul meliputi tuduhan langsung, penghinaan, sarkasme, serta penggunaan bahasa yang bersifat emosional dan provokatif. Apabila dianalisis secara pragmatik, tuturan-tuturan yang muncul dalam fenomena ini tidak hanya mengandung makna literal, tetapi juga makna tersirat. Pemaknaan tersebut terlihat pada penggunaan ungkapan yang menyiratkan kritik terhadap sikap individu yang dianggap tidak menghargai negara.

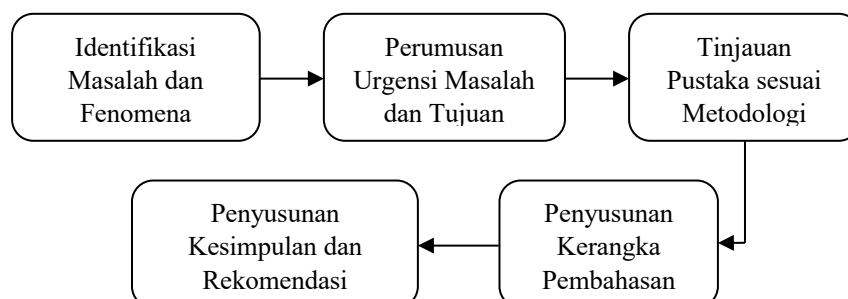
Tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai sudut pandang dalam mengkaji beasiswa LPDP dan fenomena *brain drain*, seperti Robbani dkk. (2023) yang mengidentifikasi bahwa faktor utama keengganan alumni untuk kembali adalah kesempatan kerja yang lebih menjanjikan di luar negeri serta ketidakpuasan terhadap kondisi sosial-politik di Indonesia. Dalam perspektif hubungan internasional, Fachrie dan Wahyudi (2025) menggunakan teori permainan *Stag Hunt* untuk menjelaskan bahwa fenomena #KaburAjaDulu dipicu oleh krisis kepercayaan (*mistrust*) dan kegagalan komitmen timbal balik antara pemerintah dengan para cendekiawan. Dari aspek hukum, Sumanti dkk. (2024) menegaskan bahwa penyalahgunaan fasilitas pendidikan negara oleh alumni yang tidak kembali memiliki kaitan erat dengan risiko kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2006. Sementara itu, Sarjito (2025) mengevaluasi kebijakan pemerintah seperti insentif pajak dan program diaspora, serta merekomendasikan reformasi ekosistem riset yang lebih kondusif untuk menahan laju migrasi tenaga kerja terampil. Terakhir, penelitian Hayati dkk. (2025) yang menggunakan model evaluasi CIPPO menyoroti adanya tantangan besar dalam hal aksesibilitas bagi wilayah tertinggal serta lemahnya sistem pelacakan (*tracer study*) untuk mengukur kontribusi alumni secara sistematis bagi pembangunan nasional.

Fenomena *brain drain* bukan sekadar berdampak pada berkurangnya angka potensi sumber daya manusia nasional, melainkan juga mengacu persoalan nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan generasi muda sebagai sinyal merah bagi ketahanan nasional. Pada hakikatnya, program beasiswa tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas individu, melainkan sebagai kontrak moral dalam membangun komitmen pengabdian terhadap bangsa. Apabila sebagian generasi muda memilih menetap di luar negeri, dan meninggalkan tanah air, maka muncul pertanyaan mengenai sejauh mana nilai cinta terhadap tanah air dan tanggung jawab kebangsaan masih tertanam dalam diri generasi muda Indonesia. Penelitian ini berfokus untuk menjawab bagaimana fenomena *brain drain* merefleksikan pergeseran makna cinta tanah air di kalangan generasi muda Indonesia saat ini atau di era globalisasi. Penelitian ini juga dirancang untuk mengkaji dinamika faktor pendorong dan faktor penarik yang menjadi keputusan generasi muda untuk meniti karier dan menetap di luar negeri. Selanjutnya, mengkaji dampak dari fenomena terhadap pembangunan sumber daya manusia nasional serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis yang mampu memperkuat nilai nasionalisme dan komitmen kebangsaan generasi muda terhadap negara.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggabungkan studi literatur dan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena *brain drain* pada penerima beasiswa negara, khususnya LPDP. Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah fenomenologi, yaitu metode yang berfokus pada pemahaman pengalaman dan pandangan individu terhadap suatu fenomena sosial. Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk menganalisis faktor pendorong (*push factors*) dari Indonesia serta faktor penarik (*pull factors*) dari negara tujuan yang mempengaruhi keputusan individu untuk menetap di luar negeri. Analisis dilakukan melalui observasi terhadap media sosial, artikel berita, serta berbagai jurnal yang relevan dengan fenomena tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode netnografi atau etnografi digital untuk mengamati dinamika diskusi publik di ruang digital. Netnografi dilakukan dengan menganalisis percakapan, narasi, dan sentimen masyarakat di media sosial terkait beasiswa negara dan fenomena *brain drain*. Penelitian dilakukan melalui observasi partisipatif pada forum daring serta analisis konten terhadap unggahan dengan tagar yang berkaitan dengan isu tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana opini publik terbentuk serta bagaimana masyarakat memandang hubungan antara beasiswa negara, nasionalisme, dan kewajiban pengabdian terhadap negara.



Gambar 1 Bagan Alir Tahapan Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konteks Fenomena *Brain Drain* dan Gerakan #KaburAjaDulu

Fenomena *brain drain* semakin mengemuka seiring viralnya gerakan sosial digital bertagar #KaburAjaDulu pada tahun 2025. Tagar #KaburAjaDulu sempat memuncaki *trending topic* di platform X dengan lebih dari 69.400 cuitan dalam kurun waktu seminggu dan demografi pengguna berusia 19-29 tahun mendominasi percakapan ini dengan porsi mencapai 50,81%. Gerakan ini mencerminkan keresahan kolektif generasi muda Indonesia, terutama Generasi Z, terhadap berbagai realitas struktural di dalam negeri seperti ketimpangan antara gaji dan biaya hidup, ketidakpastian karier, sistem birokrasi yang berbelit, serta kebijakan publik yang kurang berpihak pada tenaga kerja terampil. Penulis mengidentifikasi bahwa tagar ini mencerminkan krisis psikososial dan ideologis di kalangan Generasi Z dalam hubungan mereka dengan negara dan identitas nasional.

Di era globalisasi dengan arus informasi dan mobilitas yang terbuka, generasi muda dapat membandingkan kondisi dalam negeri dengan standar kehidupan di negara maju yang menawarkan upah lebih tinggi, lingkungan kerja profesional, serta sistem meritokrasi yang transparan. Hal ini menciptakan dilema nasionalisme yang konkret. Meskipun cinta tanah air ditanamkan melalui pendidikan karakter, tetapi realitas ekonomi dan profesional kerap membuat nasionalisme sulit diwujudkan secara material. Tantangan cinta tanah air bukan lagi sekadar penolakan terhadap budaya asing, melainkan bagaimana menciptakan ekosistem yang membuat generasi muda merasa bahwa berkontribusi di tanah air adalah pilihan rasional dan menguntungkan.

### Contoh Kasus

Dwi Sasetyaningtyas (DS) merupakan seorang alumni beasiswa LPDP lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) dan melanjutkan studi magister di Delft University of Technology, Belanda. Dwi Sasetyaningtyas dikenal sebagai pengusaha sosial di bidang keberlanjutan lingkungan. Suaminya, Arya Iwantoro, juga seorang alumni LPDP yang menyelesaikan pendidikan doktoral di Utrecht University dan kini bekerja sebagai peneliti di Inggris. Pasangan ini memiliki dua orang anak dan saat ini menetap di Inggris.

Pada awal tahun 2026, Dwi Sasetyaningtyas (DS) mengunggah sebuah video melalui media sosial yang menampilkan paspor Inggris milik anak keduanya. Dalam unggahan tersebut, ia menyatakan, "Cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan". Pernyataan ini seketika memicu kecaman publik yang luas karena dianggap merendahkan martabat paspor Indonesia serta dinilai tidak mencerminkan jiwa nasionalisme, mengingat statusnya sebagai alumni penerima beasiswa yang didanai oleh publik. Meskipun video tersebut kemudian dihapus, potongan rekamannya telah telanjur viral di media sosial.

Menanggapi kritik, DS menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui media sosial. Ia menegaskan tidak ada niat merendahkan bangsa sendiri dan menyatakan bangga menjadi WNI. DS mengklarifikasi bahwa pernyataannya merupakan ekspresi pribadi sebagai orang tua yang lahir dari rasa frustrasi terhadap berbagai kondisi di tanah air, bukan bentuk sikap terhadap Indonesia.

Kasus ini memicu diskusi publik yang lebih luas tentang nasionalisme, kewajiban pengabdian alumni LPDP, serta fenomena *brain drain* di Indonesia. Polemik ini juga membuka tabir temuan bahwa terdapat sejumlah alumni penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia setelah masa studi mereka selesai.

### Analisis Diskusi Publik

Diskusi publik di media sosial mengenai kasus penerima beasiswa negara yang enggan kembali ke Indonesia, menunjukkan dinamika interaksi yang kompleks. Dalam kajian pragmatik, respon masyarakat seringkali diwarnai oleh fenomena ketidaksantunan berbahasa. Bentuk-bentuk ketidaksantunan yang bermunculan di ruang digital mencakup tuduhan langsung, penghinaan, hingga penggunaan sarkasme tajam yang ditujukan kepada para penerima beasiswa yang dianggap melanggar komitmen pengabdian kepada negara.

Tabel 1 Analisis Respons Publik

Platform	Bentuk Komentar	Makna
X	"Dimana nasionalismenya? Harusnya hukuman berat karena ini masalah pembangkangan dan penghinaan pada negara dan bangsa"	Menunjukkan tuntutan publik terhadap nasionalisme dan tanggung jawab moral penerima beasiswa negara.
Instagram	"Hidup dibiayai negara, tapi ga tau cara berterimakasih"	Mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap penerima beasiswa yang dianggap tidak menghargai kontribusi negara.
TikTok	"Kecewa sama pemerintah boleh, tapi jangan sampe ada rasa benci sama negara sendiri"	Menunjukkan pandangan publik bahwa kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya berkembang menjadi kebencian terhadap negara.

Sumber: Hasil observasi komentar publik pada platform media sosial X, Instagram, dan TikTok terkait studi kasus DS, Mei 2026.

Berdasarkan hasil observasi terhadap komentar publik di media sosial, ditemukan bahwa respons masyarakat terhadap studi kasus DS didominasi oleh sentimen kritik terhadap lunturnya rasa nasionalisme di kalangan generasi terdidik. Komentar-komentar tersebut menunjukkan bahwa publik memandang penerima beasiswa negara memiliki tanggung jawab moral untuk kembali dan berkontribusi bagi Indonesia setelah memperoleh manfaat pendidikan dari negara. Selain itu, muncul pula pandangan bahwa kekecewaan terhadap kondisi sosial dan pemerintahan di dalam negeri tidak seharusnya berkembang menjadi sikap antipati terhadap bangsa sendiri. Dalam perspektif pragmatik, bentuk tuturan yang digunakan masyarakat mengandung implikatur berupa tuntutan terhadap nilai pengabdian, rasa terima kasih, serta loyalitas kebangsaan. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan bahwa diskursus mengenai *brain drain* telah berkembang menjadi isu sosial yang berkaitan erat dengan identitas nasional dan hubungan emosional warga negara terhadap Indonesia.

### Analisis Faktor *Push and Pull Brain Drain*

#### a. Faktor Pendorong (*Push Factors*) *Brain Drain* di Indonesia

Faktor pendorong merupakan kondisi negatif di dalam negeri yang mendorong tenaga kerja terampil meninggalkan Indonesia. Pertama, faktor ekonomi yang paling dominan, yaitu ketimpangan pendapatan antara Indonesia dan negara maju yang sangat signifikan sementara biaya hidup terus meningkat tanpa diimbangi upah layak. Kedua, keterbatasan kesempatan kerja berkualitas serta standar rekrutmen yang kurang realistis, menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan ketersediaan lapangan kerja. Tercatat oleh data BPS per 30 Januari 2026 bahwa tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi meningkat dari 5,18% pada Agustus 2023 menjadi 5,39% pada 2025. Ketiga, rendahnya relevansi pendidikan terhadap kebutuhan industri yang menimbulkan kesenjangan keterampilan (*skill mismatch*) yang mengakibatkan 7% dari total angkatan kerja Indonesia (lebih dari 9 juta orang) bekerja di luar negeri. Keempat, praktik nepotisme dan birokrasi yang lambat membuat profesional merasa keahlian mereka kurang dihargai dibandingkan di sistem meritokrasi luar negeri. Kelima, kebijakan publik dan ketidakstabilan ekonomi domestik yang kurang berpihak pada tenaga kerja terampil.

#### b. Faktor Penarik (*Pull Factors*) *Brain Drain* di Luar Negeri

Faktor penarik merupakan kondisi positif di negara tujuan yang membuat tenaga kerja terampil tertarik bermigrasi. Pertama, peluang karier dan pengakuan profesional yang lebih baik di negara maju dengan sistem meritokrasi yang transparan. Kedua, sistem pendidikan yang berkualitas bagi anak kerap menjadi pertimbangan penting bagi profesional yang berkeluarga. Ketiga, kualitas hidup dan layanan publik yang unggul seperti akses kesehatan, jaminan sosial, infrastruktur berkualitas, serta lingkungan yang aman. Keunggulan ini diukur melalui parameter standar hidup, kesehatan, dan pendidikan. Keempat, adanya jaringan diaspora Indonesia yang mapan di luar negeri yang memberikan dukungan sosial dan akses peluang kerja. Kelima, kebijakan ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kuat bagi pekerja (*work union rights*).

#### c. Faktor Non-finansial

Banyak tenaga terdidik memilih menetap di luar negeri karena adanya lingkungan kerja yang lebih profesional, birokrasi yang efisien, perlindungan hak pekerja yang lebih jelas, serta kepastian hukum yang memberikan rasa aman dalam bekerja. Selain itu, negara maju umumnya menyediakan kesempatan pengembangan karier dan kompetensi yang lebih luas melalui fasilitas riset yang modern, jaringan internasional, serta sistem kerja yang lebih mendukung inovasi dan aktualisasi diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan migrasi intelektual tidak hanya didasarkan pada besarnya pendapatan, tetapi juga pada keinginan memperoleh ruang kerja yang menghargai kompetensi dan mendukung pertumbuhan profesional secara berkelanjutan.

#### d. Dampak *Brain Drain* terhadap Pembangunan Nasional

Dampak negatif *brain drain* adalah hilangnya investasi negara untuk pendidikan tenaga terampil, kekurangan tenaga ahli di bidang strategis (kedokteran, teknik, riset sains, teknologi informasi), serta melambatnya pembangunan berbagai sektor. Namun demikian, fenomena ini juga dapat menghasilkan manfaat melalui pengiriman remitansi, transfer pengetahuan melalui jaringan diaspora, serta potensi kembalinya migran dengan pengalaman internasional yang lebih luas (*brain gain* melalui *returnees*). Penelitian kolaborasi industri dan pendidikan (Perpustakaan Lemhannas RI) menunjukkan bahwa strategi kolaboratif berbasis model *Triple Helix* dan pendekatan *Collaborative Governance* menjadi solusi strategis dalam mengubah potensi *brain drain* menjadi *brain gain*.

### Analisis Relasi Pemerintah-Individu (Teori *Stag Hunt*)

#### a. Penjelasan Metode *Stag Hunt*

Model *Stag Hunt* adalah permainan koordinasi yang dijelaskan oleh Jean-Jacques Rousseau. Ketika dua pemain dihadapkan pada pilihan antara bekerja sama demi hasil optimal atau bertindak individual demi hasil yang lebih kecil namun lebih pasti. Kerja sama hanya berhasil apabila kedua pihak saling percaya dan berkomitmen untuk berkoordinasi.

Dalam konteks LPDP, pemerintah berperan sebagai pemain pertama yang menginvestasikan sumber daya negara, sementara penerima beasiswa sebagai pemain kedua yang diharapkan kembali dan berkontribusi bagi

pembangunan nasional. Apabila salah satu pihak melanggar komitmen tersebut, keseimbangan kerja sama runtuh dan negara menanggung kerugian investasi. Kepercayaan menjadi faktor penentu utama dan ketika kepercayaan melemah, masing-masing pihak cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya. Hal tersebut merupakan titik kritis dalam relasi pemerintah-individu di Indonesia.

b. Aplikasi ke Kasus LPDP dan Fenomena Tidak Kembali

Program beasiswa LPDP merupakan instrumen investasi pendidikan negara yang dirancang untuk memperkuat kualitas SDM nasional. Namun, investasi besar ini tidak selalu membuahkan hasil yang diharapkan. Fenomena ini menjadi mengkhawatirkan karena sejumlah penerima beasiswa LPDP memilih tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi, sebuah kegagalan koordinasi nyata dalam kerangka Stag Hunt. Individu bertalenta tinggi meninggalkan Indonesia akibat kombinasi *push factors* dan *pull factors*. Hal ini berarti pemerintah belum efektif menyediakan ekosistem yang mendorong kepulangan alumni sehingga fenomena #KaburAjaDulu kini telah berkembang menjadi gerakan sosial yang melemahkan rasa memiliki generasi muda terhadap tanah airnya.

c. Analisis *Mistrust* dan Pilihan Rasional Individu

Kegagalan model Stag Hunt dalam konteks LPDP berpusat pada melemahnya kepercayaan individu terhadap pemerintah. Ketika penerima beasiswa meragukan kesungguhan negara dalam menyediakan lingkungan karier yang kondusif, pilihan rasionalnya adalah memaksimalkan peluang di luar negeri. Perbedaan tingkat upah dan kesempatan pengembangan diri menjadi determinan utama keputusan migrasi. Hal ini sejalan dengan logika pilihan rasional bahwa individu akan memilih opsi yang memberikan utilitas maksimal. Kesenjangan ekonomi antara Indonesia dan negara tujuan tetap relevan sebagai faktor struktural pendorong migrasi. Harapan atas imbalan lebih baik dan pengakuan kompetensi internasional juga menjadi pendorong utama keputusan berkarier di luar negeri. Pola *mistrust* ini bersifat sistemik, seperti ketidakpercayaan terhadap institusi negara, lemahnya jaminan hukum bagi tenaga profesional, dan absennya mekanisme penghargaan yang adil merupakan akar persoalan yang harus diatasi agar relasi Stag Hunt antara negara dan individu dapat dipulihkan.

### Tinjauan Regulasi dan Implikasi Hukum

a. Kontrak Beasiswa ( $2n+1$ )

Landasan hukum program LPDP dibangun di atas konstruksi kontraktual yang mengikat penerima beasiswa dengan kewajiban pengabdian kepada negara. Kontrak ini diwujudkan melalui formula  $2n+1$ , yakni kewajiban mengabdikan di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun. Kontrak ini merupakan perwujudan komitmen institusional bahwa beasiswa LPDP bukan bantuan individual semata, melainkan investasi negara yang mensyaratkan kontribusi balik sebagai instrumen membangun ketahanan SDM nasional menghadapi megatren abad ke-21.

Kerangka kontraktual LPDP mencerminkan filosofi bahwa aksesibilitas beasiswa harus diimbangi dengan akuntabilitas alumni. Secara yuridis, kontrak ini menciptakan hubungan hukum timbal balik (*do ut des*), yakni ketika penerima beasiswa gagal memenuhi kewajiban pengabdian, ia tidak hanya melanggar perjanjian administratif, tetapi juga mengingkari kontrak yang telah disepakati bersama negara.

b. Sanksi Administratif

Pelanggaran kewajiban pengabdian memiliki konsekuensi hukum konkret. Penerima beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban kembali ke Indonesia dapat dikenakan sanksi berupa pengembalian seluruh dana beasiswa beserta denda sesuai perjanjian. Namun, efektivitas sanksi ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum. Apabila pemerintah tidak konsisten menerapkannya, norma kontraktual akan kehilangan kekuatan koersifnya. Reformasi komprehensif diperlukan, mencakup pembenahan sistem penggajian publik, penguatan meritokrasi, dan penyederhanaan birokrasi agar alumni berbekal pendidikan internasional dapat berkontribusi optimal di dalam negeri.

c. Implikasi Kewarganegaraan

Fenomena tidak kembalinya penerima beasiswa LPDP memiliki implikasi yang lebih mendalam terhadap kewarganegaraan dan nasionalisme. Fenomena ini merupakan ancaman nyata bagi integrasi nasional karena mencerminkan melemahnya ikatan emosional dan konstitusional warga negara terhadap Indonesia. Secara hukum, warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri dan memperoleh kewarganegaraan asing berpotensi kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Mengingat Indonesia umumnya tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi warga dewasa yang akan menciptakan dilema hukum bagi individu. Sebagai contoh, individu yang di satu sisi terikat kontrak beasiswa, tetapi di sisi lain telah berakar kuat di negara tempat bermukim.

Program LPDP dirancang untuk membentuk pemimpin bangsa berkomitmen tinggi sehingga ketidakhadiran fisik alumni di Indonesia bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian simbolis berupa melemahnya modal sosial dan kepemimpinan nasional. Pendekatan diaspora merupakan salah satu alternatif untuk mengakui dan memanfaatkan kontribusi warga Indonesia di luar negeri meski tidak kembali secara fisik. Namun, pendekatan ini tidak boleh menjadi pembenaran atas kegagalan kebijakan dalam negeri.

### Implikasi Kebijakan

Temuan dari analisis diskusi publik, faktor pendorong dan penarik (*push-pull factors*), serta relasi kelembagaan menegaskan bahwa fenomena *brain drain* memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap ketahanan sumber daya

manusia dan semangat nasionalisme di Indonesia. Berdasarkan sintesis kajian tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan rumusan kebijakan yang komprehensif. Pertama, langkah mendesak yang perlu diambil adalah evaluasi dan penegakan regulasi kontrak beasiswa secara tegas. Pemerintah dan lembaga pengelola dana pendidikan harus transparan dalam menerapkan sanksi administratif, termasuk pengembalian dana bagi penerima beasiswa yang melanggar kontrak pengabdian, serta memperjelas konsekuensi terhadap status kewarganegaraan. Selain itu, evaluasi berkala mengenai aksesibilitas program dan kontribusi rill alumni mutlak dilakukan untuk memastikan bahwa investasi pendidikan negara benar-benar terarah pada pembangunan SDM nasional.

Lebih lanjut, kebijakan penanganan fenomena ini tidak boleh hanya bertumpu pada pendekatan punitif, melainkan harus bergeser pada upaya preventif melalui strategi retensi talenta muda. Pemerintah perlu bersikap proaktif dalam menciptakan peluang kerja yang lebih kompetitif, memperbaiki ekosistem riset, serta meningkatkan standar kesejahteraan tenaga ahli dalam negeri. Langkah ini esensial untuk mengimbangi daya tarik atau *pull factors* dari negara-negara maju, seperti lingkungan kerja yang profesional dan kebebasan berekspresi. Mengingat tren #KaburAjaDulu merepresentasikan krisis kepercayaan (*mistrust*) dan pergeseran nilai pengabdian individu, upaya struktural dalam penguatan nilai nasionalisme dan bela negara juga harus diintensifkan secara berkesinambungan kepada calon tenaga kerja dan penerima manfaat beasiswa.

Pada akhirnya, perumusan kebijakan yang holistik menjadi kunci utama dalam merespons tantangan ini. Merujuk pada kajian kelembagaan dan *policy brief* terkait migrasi SDM unggul, pemerintah harus memandang isu *brain drain* secara multidimensional yang melibatkan penyelesaian persoalan ekonomi, birokrasi, dan sosial-psikologis, bukan hanya sebatas masalah hukum kontrak. Peningkatan produktivitas serta daya saing Indonesia di era globalisasi sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mempertahankan SDM unggul yang memiliki dedikasi tinggi untuk kembali dan membangun negeri.

## KESIMPULAN

Fenomena *brain drain* khususnya di kalangan generasi muda Indonesia menjadi gambaran adanya tantangan kecintaan terhadap tanah air di era globalisasi. Keputusan lulusan perguruan tinggi dan para tenaga terdidik untuk menetap di luar negeri bukan tanpa alasan. Mereka dipengaruhi oleh faktor pendorong domestik, seperti keterbatasan lapangan kerja, fasilitas riset yang rendah, dan ketidakpastian karier, serta faktor penarik dari luar negeri berupa kesejahteraan yang dianggap lebih, lingkungan profesional, dan peluang pengembangan diri yang luas. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kurangnya kualitas sumber daya manusia unggul didalam negeri, tetapi juga mengonfirmasi adanya pergeseran cara pandang generasi muda dalam memaknai hubungan dengan negara.

Kasus Dwi Sasetyaningtyas dan viralnya gerakan #KaburAjaDulu semakin mempertegas bahwa fenomena *brain drain* bukan lagi persoalan individu semata, melainkan telah berkembang menjadi diskursus sosial yang memunculkan perdebatan mengenai nasionalisme, tanggung jawab moral, dan efektivitas investasi pendidikan negara. Reaksi masyarakat di media sosial menunjukkan munculnya berbagai bentuk ketidaksantunan berbahasa seperti sindiran, sarkasme, hingga penghinaan yang mengandung makna kritik terhadap lunturnya rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda terdidik. Dalam perspektif pragmatik, respons tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi emosional sekaligus mekanisme kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku yang dianggap tidak sejalan dengan nilai kebangsaan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan individu dalam konteks program beasiswa negara masih diwarnai oleh krisis kepercayaan (*mistrust*). Pemerintah mengharapkan penerima beasiswa kembali dan mengabdikan, sementara sebagian individu merasa bahwa sistem di dalam negeri belum mampu memberikan ruang yang cukup untuk berkembang secara profesional. Kondisi ini menciptakan dilema antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab terhadap negara. Oleh karena itu, penyelesaian fenomena *brain drain* tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum atau pemberian sanksi administratif, tetapi juga memerlukan reformasi yang lebih menyeluruh terhadap ekosistem pendidikan, riset, ketenagakerjaan, dan birokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, upaya mempertahankan talenta muda Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang mampu menghargai kompetensi, mendukung inovasi, serta memberikan kepastian karier dan kesejahteraan yang layak. Penguatan nilai nasionalisme juga perlu dilakukan tidak hanya melalui narasi moral, tetapi dengan menghadirkan kondisi nyata yang membuat generasi muda merasa bahwa kembali dan berkontribusi bagi Indonesia merupakan pilihan yang rasional, bermakna, dan membanggakan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan jurnal ilmiah ini. Kepada Ibu Zulisih Maryani, S.S., M.A. selaku dosen pengampu Mata Kuliah Bahasa Indonesia MKW24 atas bimbingan dan arahnya dalam penyusunan jurnal ini dari awal hingga akhir. Selain itu, kepada teman-teman Kelompok 2 yang telah bekerjasama dan kooperatif dalam penyusunan jurnal. Terakhir, terima kasih kepada PT. Gudang Pustaka Cendekia, melalui Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu (GJMI) yang telah menerbitkan jurnal penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhika Djalul Sembada, D., Prasetyo, D., & Yarmanto. (2024). Motivasi calon pekerja migran Indonesia bekerja ke luar negeri dan kontribusinya bagi negara Indonesia (skema penempatan Korea Selatan). *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(2).
- Fachrie, M., & Wahyudi, H. (2025). Uncovering the cause of Indonesia's brain drain: The case of #KaburAjaDulu. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1). <https://doi.org/10.31629/kemudi.v10i1.7321>
- Hayati, H. D., Rahmawati, M., Hadiyanto, H., & Yahya, Y. (2025). Beasiswa LPDP sebagai investasi pendidikan: Evaluasi aksesibilitas, kontribusi alumni, dan pemerataan pembangunan SDM. *Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah*, 10(2), 462–472. <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i2.554>
- Nabil, M. F., Nasrulloh, A., Jaguar, Y., Nu'Man, R., Zahra, S. A., & Putri, L. F. (2025). Pengaruh beasiswa LPDP terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia di era globalisasi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(6), 2113–2130. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.7809>
- Oriza, M., & Hanita, M. (2022). Analisis pengembangan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan sumber daya manusia guna menghadapi megatren abad ke-21. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6).
- Robbani, F. A., Pirdayanti, V. N., Zaki, R. M., Nugraha, D. M., & Fu'adin, A. (2023). Fenomena mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang tidak mau kembali ke Indonesia. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 6(4), 236–240.
- Sarjito, A. (2025). Strategi menahan brain drain: Evaluasi kebijakan pemerintah dalam menyediakan peluang bagi talenta muda. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 3(3), 399–424.
- Silaban, P. S. M. J., Mirza, D., Nafilah, N., & Tanjung, S. Z. (2025). Menghadapi ancaman nasionalisme disintegrasi bangsa di tengah trend Kabur Aja Dulu. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(2), 193–199. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v3i2.3821>
- Sutiani, S., CaturMuspita, N., & Amaria, H. (2025). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri (Studi pada calon tenaga kerja Indonesia di PT Indonaker Mandiri). *Translitera*, 14(2), 102–114. <https://doi.org/10.35457/translitera.v14i2.5174>
- Wardin. (2002). Beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 111–130.
- Yuspita, R. F. (2025). Fenomena “Kabur aja dulu” di Indonesia (Policy brief). Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LAN.